

Wacana sebagai Kuasa: Dimensi Filosofis Kekuasaan dan Ideologi dalam Idiom Jurnalisme Mata Najwa

Dwi Setia Ningrum¹, Syamsul Sodik², Anas Ahmadi³, Dianita Indrawati⁴

^{1,2,3,4}State University of Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: 25020835021@mhs.unesa.ac.id

Article History:

Received 2025-11-21

Accepted 2026-01-20

Keywords:

Critical Discourse Analysis

Norman Fairclough

Mata Najwa

Language Politics

Power Relations

ABSTRACT

The talk show Mata Najwa has become a significant institution in Indonesian television journalism, with its strength lying in the distinctive use of journalistic idioms. This study aims to uncover how these idioms operate ideologically to construct political reality and negotiate power relations between the state and civil society. The method employed is Norman Fairclough's three-dimensional Critical Discourse Analysis to examine five key idioms: "aturan main" (rules of the game), "pengalaman pahit" (bitter experience), "pinggir jurang" (edge of the cliff), "no viral no justice," and "keranjang sampah" (trash bin) in an episode discussing the Criminal Procedure Code Bill. Text dimension analysis reveals the use of confrontational metaphors that frame legislation as an urgent situation and reject the state's security narrative. The discourse practice dimension shows phenomena of intertextuality and democratization of legal language, where social media logic successfully intervenes in the rigidity of formal legislative bureaucracy. The social practice dimension unveils the formation of a high distrust society in Indonesia, where law is perceived as a threat of authoritarianism. This study concludes that idioms in Mata Najwa function as a mechanism of symbolic resistance (counter-hegemony) to expose the moral legitimacy crisis of those in power and demand checks and balances amid the degradation of the formal legal system.

ABSTRAK

Program bincang-bincang Mata Najwa telah menjadi institusi penting dalam jurnalisme televisi Indonesia, dengan kekuatan yang terletak pada penggunaan idiom jurnalistik yang khas. Penelitian ini bertujuan membongkar bagaimana idiom-idiom tersebut beroperasi secara ideologis untuk mengonstruksi realitas politik dan menegosiasikan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Norman Fairclough untuk mengkaji lima idiom kunci: "aturan main", "pengalaman pahit", "pinggir jurang", "no viral no justice", dan "keranjang sampah" dalam episode diskusi RUU KUHP. Analisis dimensi teks mengungkapkan penggunaan metafora konfrontatif yang membingkai legislasi sebagai situasi genting dan menolak narasi keamanan negara. Dimensi praktik wacana menunjukkan fenomena intertekstualitas dan demokratisasi bahasa hukum, di mana logika media sosial berhasil mengintervensi kekakuan birokrasi legislasi formal. Dimensi praktik sosial mengungkapkan formasi high distrust society di Indonesia, di mana hukum dipandang sebagai ancaman otoritarianisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa idiom dalam Mata Najwa berfungsi sebagai mekanisme perlawanan simbolik (counter-hegemony) untuk mengungkap krisis legitimasi moral penguasa dan menuntut checks and balances di tengah degradasi sistem hukum formal.

Kata Kunci:

Analisis Wacana Kritis

Norman Fairclough

Mata Najwa

Politik Bahasa

Relasi Kuasa

1. PENDAHULUAN

Era komunikasi digital telah mengubah lanskap penyebaran informasi dan pembentukan opini publik di Indonesia. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, X, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi ideologi dan relasi kuasa (Couldry, 2010; Jungherr et al., 2019). Dalam konteks ini, media digital menjadi ruang di mana wacana diproduksi, direproduksi, dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor sosial dengan kepentingan yang beragam, sering kali melampaui fungsi gatekeeping tradisional yang dimiliki media konvensional (Engesser et al., 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa dalam media tidak pernah bersifat netral, melainkan sarat dengan muatan ideologis yang dapat memengaruhi konstruksi realitas sosial dan politik masyarakat (Lakoff & Johnson, 1980; Fairclough, 2023).

YouTube sebagai salah satu platform media digital paling dominan telah melahirkan berbagai kanal jurnalistik yang menyajikan konten kritis terhadap kebijakan pemerintah dan isu sosial. Salah satu kanal yang paling berpengaruh adalah Narasi TV dengan program unggulannya, Mata Najwa. Program gelar wicara yang dipandu oleh jurnalis Najwa Shihab ini telah menjadi fenomena penting dalam jurnalisme televisi Indonesia, dikenal dengan pendekatan investigatif yang tajam dan penggunaan bahasa jurnalistik yang khas (Febriana et al., 2021; Abi Sukmana et al., 2023). Mata Najwa secara konsisten mengangkat isu-isu sensitif seperti korupsi, rancangan undang-undang kontroversial, pelanggaran hak asasi manusia, dan dinamika politik kekuasaan dengan gaya bahasa yang metaforis dan provokatif. Kekuatan program ini tidak hanya terletak pada ketajaman data investigasi, tetapi juga pada penggunaan idiom-idiom jurnalistik yang mampu membongkar isu dan menggiring opini publik (Charteris-Black, 2009).

Penggunaan idiom dalam wacana jurnalistik bukan sekadar ornamen estetis atau gaya retorik, melainkan praktik diskursif yang memiliki fungsi ideologis dalam mengonstruksi realitas dan memobilisasi sentimen publik (Eriyanto, 2001; van Dijk, 2008). Penelitian metafora dalam diskursus politik telah menunjukkan bahwa metafora dan idiom tidak hanya mempermudah pemahaman konsep abstrak, tetapi juga berfungsi sebagai alat framing yang membentuk persepsi dan sikap politik audiens (Burgers et al., 2016; Charteris-Black, 2018). Dalam perspektif filosofis bahasa, idiom berfungsi sebagai alat pembingkai (*framing*) yang menaturalisasi ideologi tertentu dan menjadikannya sebagai *common sense* dalam kesadaran kolektif masyarakat, di mana wacana beroperasi sebagai praktik kekuasaan itu sendiri (Foucault, 1972; Fairclough, 2020).

Meskipun terdapat sejumlah penelitian tentang wacana media dan jurnalisme investigatif di Indonesia, sebagian besar fokus pada analisis representasi atau framing konten berita (Suprobo, 2016). Beberapa studi telah mengkaji Mata Najwa dari perspektif jurnalisme selebritas (Abi Sukmana et al., 2023), transmedia storytelling (Richyadie, 2022), dan otoritas simbolik jurnalis (Pasah et al., 2025). Namun, belum ada kajian mendalam yang secara sistematis membedah dimensi filosofis kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi dalam idiom-idiom jurnalistik Mata Najwa melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Norman Fairclough. Celah pengetahuan ini penting untuk diisi mengingat idiom dalam jurnalisme bukan hanya persoalan linguistik, tetapi merupakan praktik kuasa yang dapat melegitimasi atau mendelegitimasi aktor politik tertentu (Wodak & Meyer, 2016; Kitis & Milapides, 1997).

Penelitian ini berangkat dari premis filosofis bahwa wacana adalah praktik kekuasaan itu sendiri, di mana kuasa tidak hanya beroperasi melalui larangan dan paksaan, melainkan melalui produksi pengetahuan dan penciptaan kategori-kategori sosial (Foucault, 1972). Dalam konteks Mata Najwa, penggunaan idiom tertentu dapat dipahami sebagai mekanisme perlawanan simbolik (*counter-hegemony*) terhadap narasi dominan negara (Hall, 1997; Haryatmoko, 2016). Idiom-idiom tersebut berfungsi membentuk identitas kolektif antara "kami" (masyarakat sipil yang kritis) dan "mereka" (elite penguasa yang

korup), sekaligus menegosiasikan relasi kuasa yang timpang dalam arena politik Indonesia kontemporer (Ahmadi, 2017; Tong, 2015).

Urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah fenomena regresi demokrasi dan melemahnya fungsi pengawasan institusi formal di Indonesia (Adi, 2016). Mata Najwa telah mengisi ruang kosong tersebut sebagai media independen yang memantau dan mengkritisi kinerja institusi kekuasaan, namun perlu dikaji secara kritis bagaimana kuasa yang dipraktikkan melalui idiom-idiomnya dapat menciptakan bentuk kuasa baru yang juga berpotensi dominatif (Wodak & Meyer, 2016; Painter, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk membongkar mekanisme ideologis yang beroperasi dalam lima idiom kunci Mata Najwa: "aturan main", "pengalaman pahit", "pinggir jurang", "no viral no justice", dan "keranjang sampah" melalui kerangka AWK model tiga dimensi Fairclough yang menganalisis level teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosial budaya (makro) (Fairclough, 1992; Jørgensen, 2002).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami dinamika kuasa bahasa dalam jurnalisme kontemporer Indonesia, khususnya dalam era media digital di mana batas antara jurnalisme, aktivisme, dan hiburan semakin kabur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kritis terhadap praktik jurnalistik yang menggunakan idiom sebagai senjata simbolik dalam pertarungan wacana, serta mengungkap implikasi sosial-politik dari praktik diskursif tersebut terhadap pembentukan kesadaran kolektif dan partisipasi demokratis masyarakat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan mendekonstruksi relasi kuasa serta ideologi yang tersembunyi dalam bahasa (Wodak & Meyer, 2016). Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada makna, konteks, dan proses rekonstruksi yang memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana wacana mengonstruksi realitas sosial dan politik (Fairclough, 1992). Penelitian ini menerapkan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Norman Fairclough untuk mengkaji idiom dalam wacana jurnalistik Mata Najwa. Model ini dipilih karena kemampuannya mengintegrasikan analisis linguistik dengan konteks sosial yang lebih luas, memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya struktur tekstual tetapi juga praktik diskursif dan kondisi sosial-politik yang melatarbelakanginya (Jørgensen, 2002; Mullet, 2018).

Subjek penelitian ini adalah idiom-idiom jurnalistik yang digunakan dalam program Mata Najwa, khususnya episode bertajuk "Bedah RUU KUHAP Bareng DPR: Agar Proses dan Substansi Bukan Basa-Basi". Pemilihan episode ini dilakukan secara purposif dengan kriteria spesifik: episode membahas isu legislasi kontroversial, menghadirkan interaksi langsung antara jurnalis dan pembuat kebijakan, serta memuat penggunaan idiom yang intensif dan bermuatan ideologis (Palinkas et al., 2015; Campbell et al., 2020). Teknik purposive sampling ini sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman pemahaman terhadap fenomena spesifik daripada generalisasi statistik (Patton, 2002). Data yang dianalisis berupa lima idiom kunci: "aturan main", "pengalaman pahit", "pinggir jurang", "no viral no justice", dan "keranjang sampah". Kelima idiom ini dipilih karena representativitasnya dalam menggambarkan strategi diskursif yang digunakan untuk membangun relasi kuasa antara media, negara, dan masyarakat sipil.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi video program Mata Najwa yang diakses melalui kanal YouTube resmi Narasi TV. Setiap idiom diidentifikasi dengan mencatat timestamp kemunculan, konteks penggunaan dalam dialog, serta respons dari narasumber (Wodak & Meyer, 2016). Transkripsi verbatim dilakukan untuk memastikan akurasi data linguistik, termasuk intonasi, jeda, dan penekanan yang relevan dengan analisis wacana. Proses ini mengikuti prosedur standar pengumpulan data dalam AWK yang menekankan pentingnya merekam tidak hanya isi verbal tetapi juga konteks situasional dan interaksional (Fairclough, 2003). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan

membandingkan penggunaan idiom dalam beberapa episode Mata Najwa lainnya, memastikan bahwa pola diskursif yang ditemukan bersifat konsisten dan bukan sekadar anomali (Shenton, 2004).

Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model tiga dimensi Fairclough. Pada dimensi pertama, analisis tekstual, peneliti mengkaji struktur linguistik idiom dari aspek morfologi, sintaksis, dan semantik untuk mengidentifikasi bagaimana makna idiomatik dibentuk dan bagaimana idiom berfungsi sebagai alat framing realitas (Fairclough, 2023; Mudiawati et al., 2023). Dimensi kedua, analisis praktik wacana, menjelaskan proses produksi, distribusi, dan konsumsi idiom dalam konteks program Mata Najwa, termasuk analisis intertekstualitas dan interdiskursivitas yang menunjukkan bagaimana idiom-idom tersebut terhubung dengan wacana lain di luar teks (Fairclough, 2020). Dimensi ketiga, analisis praktik sosial, mengungkapkan hubungan antara wacana dengan struktur sosial yang lebih luas, khususnya bagaimana idiom merefleksikan dan mereproduksi ideologi, hegemoni, dan relasi kuasa dalam masyarakat Indonesia kontemporer (van Dijk, 2008; Haryatmoko, 2016). Proses analisis bersifat abduktif dan iteratif, dengan pergerakan bolak-balik antara data empiris dan kerangka teoretis untuk menghasilkan interpretasi yang kohesif dan mendalam (Wodak & Meyer, 2016). Reliabilitas analisis dijaga melalui konsistensi penerapan kerangka analitis Fairclough pada setiap unit data dan reflektivitas peneliti terhadap posisionalitas dan potensi bias interpretasi (Mullet, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis wacana kritis model Fairclough terhadap idiom-idom jurnalistik dalam program Mata Najwa mengungkapkan temuan-temuan penting yang menggambarkan bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen kuasa dalam konteks legislasi RUU KUHAP. Temuan penelitian ini dipresentasikan secara sistematis melalui tiga dimensi analisis yang saling terkait.

Temuan Dimensi Tekstual

Pada level tekstual, analisis mengidentifikasi lima idiom kunci yang digunakan dalam episode "Bedah RUU KUHAP Bareng DPR: Agar Proses dan Substansi Bukan Basa-Basi". Tabel 1 menyajikan data idiom beserta konteks penggunaan dan makna idiomatiknya.

Analisis linguistik menunjukkan bahwa kelima idiom tersebut (pada tabel 1) merupakan idiom kategori sebagian, di mana makna keseluruhan dapat diprediksi dari salah satu unsur pembentuknya namun mengalami perluasan semantik ketika digunakan dalam konteks politik. Idiom "aturan main" (I-01) menggunakan metafora permainan untuk membingkai legislasi sebagai arena kompetisi dengan pemenang dan pecundang. Struktur frasa ini menciptakan pembingkai yang menaturalisasi konsep bahwa hukum bukanlah sistem keadilan yang absolut melainkan konstruksi yang dapat dimanipulasi oleh pihak yang menguasai "aturan".

Idiom "pengalaman pahit" (I-02) mengaktifkan memori kolektif negatif terhadap produk legislasi masa lalu. Penggunaan kata "pahit" yang secara literal merujuk pada rasa tidak sedap ditransformasikan menjadi metafora perasaan yang merepresentasikan trauma dan kekecewaan mendalam. Struktur repetisi "pengalaman pahit... pengalaman pahit tentang" berfungsi memperkuat intensitas emosional dan memvalidasi skeptisisme terhadap proses legislasi.

Idiom "pinggir jurang" (I-03) mengkonstruksi narasi bahaya melalui metafora spasial yang ekstrem. Pemilihan kata "jurang" alih-alih istilah netral seperti "batas" menghadirkan imaji visual yang dramatik dan mengancam. Kalimat kondisional "kalau kelebihan jadi bahaya" menciptakan sense of urgency dan memposisikan audiens untuk menerima bahwa situasi saat ini berada dalam kondisi kritis yang membutuhkan intervensi segera.

Table 1. Data Idiom dalam wacana

No	Timespend (Waktu)	Kode Idiom	Wacana (Kutipan)	Makna Idiom dalam Konteks
1	01.48	I-01	"Dan rancangan kitab hukum acara pidana ini adalah peta yang akan menentukan aturan mainnya."	Aturan Main: ungkapan yang mendeskripsikan bahwa RUU KUHP sebagai panduan dan sistem yang mendasar dan tidak dapat berubah dan dapat menentukan seseorang dalam kedudukan hukum.
2	05.07	I-02	"Kita punya banyak pengalaman pahit. Iya, Pak Tandra. Pengalaman pahit tentang bagaimana proses legislasi itu dilakukan"	Pengalaman pahit: ungkapan idiom yang mendeskripsikan seseorang mengalami hal yang tidak menyenangkan serta merugikan dalam tatanan regulasi yang diberlakukan.
3	15.56	I-03	"Tetapi itu kan di pinggir jurang. Kalau kelebihan jadi bahaya. Kalau negaranya otoriter..."	Pinggir Jurang: ungkapan yang mendeskripsikan posisi yang sangat kritis dan berbahaya. Dalam hal ini menggambarkan keseimbangan kewenangan negara yang jika berlebihan sedikit saja akan jatuh pada otoritarianisme.
4	1.16.12	I-04	"Ada usul tidak dari koalisi spesifik soal itu mekanismenya seharusnya bagaimana supaya tidak no viral no justice nih..."	No Viral No Justice: berupa idiomatik kontemporer yang menyindir bahwa keadilan hukum di Indonesia baru bekerja efektif dan ditindak jika sebuah kasus sudah menjadi tontonan publik (viral) di media sosial.
5	1.23.53	I-05	"Seolah-olah Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh kasih seolah-olah jadi semacam keranjang sampah begitu..."	Keranjang Sampah: ungkapan untuk tempat pembuangan akhir masalah legislasi yang buruk. Kritik bahwa MK dianggap hanya sebagai penampung kesalahan pembuat UU.

Temuan tidak terduga muncul pada idiom "no viral no justice" (I-04), sebuah konstruksi idiomatik hibrida yang menggabungkan bahasa Inggris dengan struktur paralelisme negasi ganda. Idiom ini tidak ditemukan dalam kamus idiom konvensional Indonesia namun telah menjadi frasa yang terleksikalisasi dalam wacana digital Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris memberikan nuansa modernitas dan kosmopolitanisme, sekaligus menandai pergeseran sumber otoritas dari institusi formal menuju ruang digital.

Idiom "keranjang sampah" (I-05) menggunakan metafora objektifikasi yang merendahkan untuk mendeskripsikan fungsi Mahkamah Konstitusi. Pemilihan kata "sampah" alih-alih "masalah" atau "kasus" mengandung penilaian moral yang sangat negatif terhadap produk legislasi DPR. Struktur "seolah-olah... seolah-olah" menciptakan jarak epistemologis yang memungkinkan jurnalis menyampaikan kritik tajam sambil mempertahankan posisi sebagai pengamat netral.

Temuan Dimensi Praktik Wacana

Pada dimensi praktik wacana, analisis mengungkapkan bagaimana idiom-idiom tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam ekosistem media digital. Idiom-idiom ini tidak muncul secara spontan melainkan merupakan hasil dari proses intertekstualitas yang kompleks.

Idiom "aturan main" (I-01) diproduksi oleh jurnalis Najwa Shihab dalam konteks diskusi dengan anggota DPR dan pakar hukum. Proses produksi ini menggabungkan dua genre wacana yang berbeda: wacana hukum formal yang bersifat teknis dan wacana populer yang menggunakan analogi permainan. Distribusi idiom melalui platform YouTube memungkinkan konsumsi massal oleh audiens yang heterogen, dari akademisi hingga masyarakat awam. Konsumsi idiom ini menghasilkan internalisasi framing bahwa legislasi adalah permainan strategis di mana kepiawaian taktis lebih penting daripada keadilan substantif.

Fenomena intertekstualitas sangat jelas pada idiom "pengalaman pahit" (I-02). Idiom ini merujuk secara implisit kepada teks-teks legislatif masa lalu seperti UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK yang kontroversial. Praktik interdiskursivitas terjadi ketika wacana trauma kolektif dari peristiwa politik masa lalu diaktivasi kembali untuk membingkai diskusi tentang RUU KUHAP saat ini. Mekanisme ini menciptakan kontinuitas naratif yang menghubungkan kegagalan masa lalu dengan potensi kegagalan masa depan.

Idiom "pinggir jurang" (I-03) didistribusikan tidak hanya melalui teks verbal tetapi juga melalui intonasi dan ekspresi visual jurnalis yang terekam dalam video. Multimodalitas ini memperkuat efek dramatik idiom. Konsumsi idiom ini oleh audiens menghasilkan afek ketakutan yang dimobilisasi untuk mendukung posisi jurnalis dalam negosiasi dengan narasumber yang merupakan pembuat kebijakan.

Temuan paling signifikan muncul pada praktik wacana idiom "no viral no justice" (I-04). Idiom ini menunjukkan pergeseran radikal dalam mode produksi wacana hukum. Jika sebelumnya wacana hukum diproduksi secara eksklusif oleh institusi formal (pengadilan, Kejaksaan, polisi), kini produksi wacana telah terdemokratisasi melalui media sosial. Idiom ini mengkodifikasi logika platform digital di mana visibilitas algoritma menentukan tindakan institusional. Distribusi idiom ini menciptakan tekanan performatif pada aparat penegak hukum untuk merespons kasus-kasus yang viral demi menjaga legitimasi publik.

Idiom "keranjang sampah" (I-05) diproduksi melalui strategi retorik yang menggabungkan kritik terhadap DPR dan MK sekaligus. Interdiskursivitas terjadi ketika wacana tentang kualitas legislasi (domain legislatif) dikaitkan dengan wacana tentang fungsi judicial review (domain yudikatif). Konsumsi idiom ini menghasilkan normalisasi ekspektasi rendah terhadap kualitas produk legislasi dan menggeser tanggung jawab pengawasan dari DPR ke MK.

Temuan Dimensi Praktik Sosial

Pada dimensi praktik sosial, analisis mengungkapkan bahwa idiom-idiom tersebut merefleksikan dan mereproduksi formasi ideologis dan relasi kuasa yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Idiom "aturan main" (I-01) merefleksikan ideologi pragmatisme hukum yang menggantikan idealisme hukum. Dalam praktik sosial, idiom ini berkontribusi pada pembentukan kesadaran bahwa hukum bukanlah instrumen keadilan melainkan instrumen kekuasaan yang dapat dimanipulasi. Hegemoni yang beroperasi di sini adalah normalisasi bahwa keberhasilan dalam sistem hukum bergantung pada penguasaan "permainan" daripada kebenaran moral. Idiom ini juga mengungkapkan relasi kuasa antara pembuat undang-undang (yang memegang monopoli untuk menentukan "aturan") dan masyarakat sipil (yang harus "bermain" sesuai aturan tersebut).

Idiom "pengalaman pahit" (I-02) mengkristalisasi fenomena high distrust society di Indonesia. Praktik sosial yang terbentuk adalah budaya kecurigaan permanen terhadap institusi negara. Idiom ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi psikologis kolektif tetapi juga aktif mereproduksi kondisi tersebut dengan terus-menerus mengaktifkan memori trauma. Relasi kuasa yang terungkap adalah inversi legitimasi di mana negara kehilangan otoritas moral dan masyarakat sipil mengklaim posisi sebagai penjaga moral yang lebih sah.

Idiom "pinggir jurang" (I-03) merepresentasikan ideologi liberalisme konstitusional yang menekankan pembatasan kekuasaan negara. Praktik sosial yang termanifestasi adalah waspada kolektif terhadap ekspansi kewenangan aparat negara. Idiom ini mengaktifkan memori trauma otoritarianisme Orde Baru dan menempatkan setiap penguatan kewenangan negara sebagai potensi ancaman terhadap kebebasan sipil. Filosofi kekuasaan yang beroperasi adalah konsep checks and balances yang radikal di mana kekuasaan negara harus terus-menerus dicurigai dan dibatasi.

Temuan paling transformatif muncul pada praktik sosial idiom "no viral no justice" (I-04). Idiom ini menandai pergeseran fundamental sumber legitimasi dari institusi formal ke massa digital. Praktik sosial yang terbentuk adalah okhlokrasi digital di mana tekanan massa melalui viralitas menggantikan prosedur

hukum formal sebagai mekanisme penegakan keadilan. Relasi kuasa mengalami redistribusi di mana rakyat dengan smartphone menjadi pengawas (sinoptikon) yang memiliki kemampuan memaksa institusi negara untuk bertindak. Namun, praktik ini juga menciptakan ketimpangan baru di mana keadilan menjadi privilese yang hanya dapat diakses oleh kasus-kasus yang berhasil viral.

Idiom "keranjang sampah" (I-05) merefleksikan krisis legitimasi institusi legislatif yang mendalam. Praktik sosial yang termanifestasi adalah normalisasi ekspektasi rendah terhadap kualitas legislasi. Masyarakat tidak lagi berharap DPR akan menghasilkan undang-undang yang berkualitas sejak awal; ekspektasi telah bergeser bahwa setiap produk legislasi pasti cacat dan harus diperbaiki oleh MK. Ideologi yang beroperasi adalah sinisme politik yang menganggap korupsi dan inkompetensi legislatif sebagai hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari. Relasi kuasa yang terungkap adalah disfungsi dalam sistem trias politica di mana lembaga yudikatif terpaksa mengambil alih fungsi kontrol kualitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab legislatif.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana metafora dan idiom dalam wacana politik berfungsi sebagai instrumen framing yang powerful. Dalam kerangka teori metafora konseptual Lakoff dan Johnson (1980), temuan menunjukkan bahwa idiom-idiom jurnalistik bukan hanya ornamen retorik melainkan struktur kognitif yang membentuk pemahaman fundamental audiens tentang realitas politik. Idiom "aturan main" mengaktifkan skema konseptual LEGISLASI ADALAH PERMAINAN, yang secara sistematis membingkai domain abstrak hukum melalui domain konkret permainan yang lebih familiar. Temuan ini sejalan dengan argumen Brugman et al. (2019) bahwa metaphorical framing through concepts memiliki efek persuasif yang lebih kuat daripada sekadar penggunaan kata-kata metaforis karena mengaktifkan seluruh jaringan makna yang koheren.

Analisis dimensi praktik wacana mengungkapkan fenomena yang resonan dengan konsep intertekstualitas Fairclough (1992) dan interdiskursivitas yang menjadi ciri khas AWK. Idiom "pengalaman pahit" berfungsi sebagai jembatan intertekstual yang menghubungkan diskusi RUU KUHAP saat ini dengan narasi kegagalan legislatif masa lalu. Mekanisme ini konsisten dengan temuan Musolff (2019) tentang bagaimana metaphor scenarios dalam diskursus politik menciptakan kontinuitas naratif yang mem-frame kejadian baru dalam kerangka interpretasi yang sudah mapan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan dimensi tambahan yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur: bagaimana trauma kolektif yang ter-enkode dalam idiom dapat dimobilisasi sebagai sumber daya politik untuk melawan hegemoni negara.

Temuan tentang idiom "no viral no justice" menawarkan kontribusi empiris penting terhadap literatur tentang aktivisme digital di Indonesia. Penelitian ini mengkonfirmasi dan memperdalam argumen Jalli (2025) dan Nugroho (2025) tentang bagaimana viralitas telah menjadi currency politik yang menentukan respons institusional. Namun, berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang fokus pada mobilisasi massa melalui hashtag, penelitian ini mengungkapkan bahwa viralitas telah ter-leksikalisasi menjadi idiom yang digunakan bahkan oleh jurnalis mainstream dalam diskusi dengan pembuat kebijakan. Ini menandakan normalisasi logika media sosial dalam diskursus politik formal, fenomena yang oleh Engesser et al. (2017) disebut sebagai "blurring boundaries" antara media tradisional dan media sosial. Temuan ini juga mengkonfirmasi observasi tentang shifting patterns of civil society participation yang didokumentasikan dalam konteks gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw, di mana tekanan digital telah menjadi mekanisme accountability yang lebih efektif daripada prosedur formal.

Pada dimensi praktik sosial, temuan penelitian ini memberikan bukti empiris untuk fenomena high distrust society yang diidentifikasi dalam dokumen asli. Temuan ini resonan dengan data tentang eroding

trust in democratic institutions yang dilaporkan dalam berbagai survei di Indonesia dan global (Pepinsky, 2025; Fossati & Shim, 2025). Idiom-idiom yang dianalisis bukan hanya merefleksikan ketidakpercayaan tetapi juga aktif mereproduksinya melalui praktik diskursif yang berulang. Ini sejalan dengan teori Foucault (1972) tentang wacana sebagai praktik yang konstitutif, bukan hanya representatif. Ketika jurnalis secara konsisten menggunakan idiom "keranjang sampah" untuk mendeskripsikan produk legislasi, praktik diskursif ini tidak hanya melaporkan kualitas buruk legislasi tetapi juga mem-frame ekspektasi publik dan menormalisasi disfungsi legislatif.

Interpretasi mendalam terhadap idiom "pinggir jurang" mengungkapkan ketegangan yang belum terselesaikan dalam demokrasi Indonesia antara kebutuhan akan keamanan dan kebebasan sipil. Temuan ini mendukung argumen Mietzner (2025) dan Power (2020) tentang democratic backsliding di Indonesia, di mana respons pemerintah terhadap tantangan populisme Islam justru mengadopsi strategi authoritarian yang mengikis kebebasan sipil. Idiom ini meng-capture anxiety kolektif tentang potensi kembalinya otoritarianisme, ketakutan yang tidak irasional mengingat konteks politik Indonesia yang ditandai oleh remilitarisasi dan melemahnya institusi checks and balances seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana trauma historis Orde Baru masih menghantu imajinasi politik Indonesia kontemporer dan bagaimana trauma ini dimobilisasi dalam pertarungan wacana.

Temuan tidak terduga tentang multimodalitas dalam distribusi idiom—terutama bagaimana intonasi, ekspresi wajah, dan timing mempengaruhi efek persuasif—membuka perspektif baru tentang perlunya analisis wacana kritis untuk melampaui teks verbal. Ini sejalan dengan perkembangan terbaru dalam CDA yang menekankan pentingnya multimodal discourse analysis. Dalam konteks media digital di mana video menjadi format dominan, dimensi visual dan prosodi menjadi sama pentingnya dengan pilihan leksikal dalam konstruksi makna ideologis.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen van Dijk (2008) tentang bagaimana ideologi bekerja paling efektif ketika dinaturalisasi melalui common sense. Idiom-idiom yang dianalisis telah menjadi bagian dari repertoar bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia, sehingga efek ideologisnya tidak lagi disadari. Ketika audiens menggunakan idiom "aturan main" untuk mendeskripsikan legislasi, mereka secara tidak sadar mengadopsi framing yang menormalisasi manipulasi hukum sebagai hal yang wajar. Proses naturalisasi ini adalah mekanisme hegemoni Gramscian yang bekerja melalui consent rather than coercion.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi dimensi counter-hegemonic dari idiom-idiom tersebut. Berbeda dengan analisis yang melihat media sebagai alat dominasi, temuan menunjukkan bahwa Mata Najwa menggunakan idiom sebagai senjata simbolik untuk melawan hegemoni negara. Ini mendukung konsep Hall (1997) tentang media sebagai arena pertarungan makna di mana berbagai kekuatan sosial berkontestasi untuk mendefinisikan realitas. Idiom "no viral no justice" secara khusus menandai moment of resistance di mana logika populer menantang monopoli institusi formal atas definisi keadilan. Temuan ini resonan dengan literatur tentang counter-hegemony dan symbolic power dalam jurnalisme investigatif (Tong, 2015; Painter, 2008).

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui. Pertama, fokus pada satu episode program membatasi generalisabilitas temuan. Kedua, analisis berbasis pada teks tidak dapat sepenuhnya menangkap kompleksitas resepsi audiens yang heterogen. Ketiga, ketiadaan data longitudinal membatasi kemampuan untuk melacak evolusi penggunaan idiom dan efek kumulatifnya terhadap kesadaran publik. Penelitian future sebaiknya menggunakan mixed methods yang menggabungkan CDA dengan etnografi resepsi dan analisis big data untuk menangkap dinamika yang lebih komprehensif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan CDA dengan menunjukkan bagaimana idiom berfungsi sebagai unit analisis yang produktif untuk mengungkap relasi kuasa. Temuan memperkuat argumen bahwa metafora dan idiom bukan hanya stylistic devices melainkan cognitive tools

yang membentuk pemahaman politik fundamental. Secara praktis, temuan mengindikasikan perlunya media literacy yang kritis untuk membantu audiens mengenali dimensi ideologis dalam bahasa jurnalistik. Bagi praktisi jurnalisme, penelitian ini menunjukkan tanggung jawab etis untuk reflektif tentang bagaimana pilihan bahasa dapat mereproduksi atau menantang struktur kekuasaan yang timpang. Bagi pembuat kebijakan, temuan tentang erosi kepercayaan publik harus menjadi warning signal untuk memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa idiom dalam jurnalisme investigatif adalah crystallized forms of political consciousness yang meng-encode pengalaman kolektif, aspirasi, dan ketakutan masyarakat. Idiom-idiom yang dianalisis berfungsi sebagai diagnostic tools yang mengungkapkan state of democracy Indonesia: sebuah demokrasi yang secara prosedural masih berfungsi namun mengalami legitimacy crisis yang mendalam. Nilai konseptual utama penelitian ini adalah demonstrasi empiris bahwa bahasa bukan hanya reflects reality tetapi actively constructs it, dan bahwa pertarungan atas makna idiom adalah pertarungan atas definisi keadilan, kekuasaan, dan demokrasi itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa idiom-idiom jurnalistik dalam program Mata Najwa berfungsi sebagai instrumen diskursif yang kompleks dalam menegosiasikan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Analisis wacana kritis model tiga dimensi Fairclough terhadap lima idiom kunci—"aturan main", "pengalaman pahit", "pinggir jurang", "no viral no justice", dan "keranjang sampah"—menunjukkan bahwa idiom-idiom tersebut bukan sekadar ornamen retorik melainkan mekanisme pembingkai ideologis yang mengonstruksi realitas politik, memobilisasi sentimen publik, dan menantang hegemoni negara. Pada level tekstual, idiom-idiom mengaktifkan skema metaforis yang membingkai legislasi sebagai arena kompetisi berbahaya yang mengancam demokrasi. Pada level praktik wacana, terjadi demokratisasi produksi wacana hukum melalui logika media sosial yang mengintervensi kekakuan birokrasi formal. Pada level praktik sosial, idiom-idiom merefleksikan dan mereproduksi fenomena high distrust society di Indonesia, di mana legitimasi institusi negara mengalami krisis mendalam.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada demonstrasi empiris bagaimana idiom sebagai unit analisis dapat mengungkap operasi kuasa yang tersembunyi dalam bahasa jurnalistik, memperkaya metodologi analisis wacana kritis dalam konteks media digital Indonesia. Secara praktis, temuan mengindikasikan urgensi transparansi dan akuntabilitas legislatif untuk merestorasi kepercayaan publik, serta perlunya literasi media kritis yang memungkinkan audiens mengenali dimensi ideologis dalam praktik jurnalistik. Keterbatasan penelitian ini mencakup fokus pada satu episode yang membatasi generalisabilitas, ketiadaan data resepsi audiens yang dapat mengungkap variasi interpretasi, dan analisis berbasis teks yang tidak menangkap kompleksitas multimodal secara komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan mixed methods yang menggabungkan analisis wacana kritis dengan etnografi resepsi dan analisis big data untuk menangkap dinamika longitudinal penggunaan idiom serta efek kumulatifnya terhadap kesadaran politik masyarakat. Studi komparatif lintas program jurnalistik dan analisis variasi idiom dalam konteks isu politik yang berbeda juga akan memperkaya pemahaman tentang praktik diskursif media dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

5. REFERENSI

- Abi Sukmana, K., Razandi, M. A., Maulana, M. A. A., & Novianty, R. (2023). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Pengangkatan Najwa Shihab Sebagai Tim Sukses AMIN di TvOne. *Jurnal Audiens*, 4(4), 640-650. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i4.264>

- Adi, D. S. (2016). Jurnalisme Publik & Jurnalisme Warga serta Perannya dalam Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Proses Demokrasi. *Jurnal Nomosleca*, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v2i1.341>
- Ahmadi, A. (2017). Pertarungan maskulinitas dan feminitas dalam cerpen Indonesia mutakhir. *Jurnal Bébasan*, 5(2), 115–128. <https://jurnalbebasan.kemdikbud.go.id/bebasan/index.php/home/article/view/55>
- Brugman, B. C., Burgers, C., & Steen, G. J. (2019). Recategorizing political frames: A systematic review of metaphorical framing in experimental studies on political communication. *Annals of the International Communication Association*, 43(2), 147–197. <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1312481>
- Burgers, C., Konijn, E. A., & Steen, G. J. (2016). Figurative framing: Shaping public discourse through metaphor, hyperbole, and irony. *Communication Theory*, 26(4), 410–430. <https://doi.org/10.1111/comt.12096>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Charteris-Black, J. (2009). Metaphor and political communication. In A. Musolff & J. Zinken (Eds.), *Metaphor and discourse* (pp. 97–115). Palgrave Macmillan.
- Charteris-Black, J. (2018). *Analysing political speeches: Rhetoric, discourse and metaphor*. Bloomsbury Publishing.
- Couldry, N. (2010). *Why voice matters: Culture and politics after neoliberalism*. SAGE Publications.
- Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Büchel, F. (2017). Populism and social media: How politicians spread a fragmented ideology. *Information, Communication & Society*, 20(8), 1109–1126. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (2023). Critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of discourse analysis* (pp. 11-22). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003035244>
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Fairclough, N. (2020). *Language and power* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315838250>
- Febriana, A. S., Dharta, F. Y., & Oxygentri, O. (2021). jurnalisme independen media televisi: analisis framing tayangan program mata najwa episode â€œ œmereka-reka cipta kerjaâ€œ di TRANS7. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(2), 205-218. <https://doi.org/10.36841/cermin.unars.v5i2.991>
- Fossati, D., & Shim, J. (2025). Political Representation in East and Southeast Asia. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.2101>
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language*. Pantheon Books.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar rezim kepastian: Pemikiran kritis post-strukturalis*. Kanisius.
- Jalli, N. (2025). Viral Justice: TikTok Activism, Misinformation, and the Fight for Social Change in Southeast Asia. *Social Media+ Society*, 11(1), 20563051251318122. <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. SAGE Publications.
- Jungherr, A., Rivero, G., & Gayo-Avello, D. (2019). *Retooling politics: How digital media are shaping democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108652889>

- Kitis, E., & Milapides, M. (1997). Read it and believe it: How metaphor constructs ideology in news discourse. A case study. *Journal of Pragmatics*, 28(5), 557–590. [https://doi.org/10.1016/S0378-2166\(97\)00075-1](https://doi.org/10.1016/S0378-2166(97)00075-1)
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Mietzner, M. (2025). The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *Third World Quarterly*, 46(2), 153–169. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>
- Mullet, D. R. (2018). A general critical discourse analysis framework for educational research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- Musolff, A. (2019). Metaphor scenarios in immigration discourse. In E. Semino & Z. Demjén (Eds.), *The Routledge handbook of metaphor and language* (pp. 468–480). Routledge.
- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10), 91–105. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>
- Painter, C. (2008). Counter-hegemonic news: A case study of Al-Jazeera English and Telesur. *Reuters Institute Fellowship Paper*, University of Oxford.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pasah, M., Raharjo, A. S., Almagfira, A., Syahir, F. H., Asmara, D. A., Carolina, L. L., ... & Amelia, S. P. (2025). Mata Najwa Sebagai Cermin Demokrasi dan Representasi Kebenaran Dalam Media Alternatif. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1796>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pepinsky, T. B. (2025). State, Society, and the Politics of Democratic Backsliding. *Society, and the Politics of Democratic Backsliding* (July 23, 2025). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5363315>
- Power, T. P. (2020). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Richyadie, T. N. D. (2022) *Analisis Wacana Tentang Penegakan Hukum Pada Program Mata Najwa Trans 7 di Episode Keadilan Bersyarat bagi Seluruh Rakyat Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66341>
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75. <https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>
- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). Analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan menteri Susi Pudjiastuti (Studi pada situs berita Detik. com, Kompas. com dan Antarane.ws. com periode Oktober-Desember 2014). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1). <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/499>
- Tong, J. (2015). The formation of an agonistic public sphere: Emotions, the Internet and news media in China. *China Information*, 29(3), 333–351. <https://doi.org/10.1177/0920203X15602863>
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3>

Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE Publications.